

Kode>Nama Rumpun Ilmu* : 601 / Ilmu Sosial dan Politik

LAPORAN PENELITIAN FUNDAMENTAL



**KAJIAN *ACTOR-NETWORK THEORY*
PEMILIHAN BUPATI di KABUPATEN DEMAK**

TIM PENGUSUL
Dra. Susanti, M.Si. NIDN. 0014126704
Dra. Mani Festati Broto, M.Ed. NIDN. 0023026002
Drs. Setyo Kuncoro, M.A. NIDN.0014127105

UNIVERSITAS TERBUKA

2014

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN LANJUT**

1. a. Judul Penelitian Kajian *Actor Network Theory* Pemilihan Bupati di Kabupaten Demak
b. Bidang Penelitian Keilmuan
c. Bidang Ilmu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
d. Klasifikasi Penelitian Penelitian Lanjut

2. Ketua Tim Peneliti
a. Nama Dra. Susanti, M.Si
b. Pangkat/golongan Pembina Tk. I IV/b
c. Jabatan/NIP Lektor Kepala/196712141993032002
d. Fakultas/Unit Kerja FISIP UT

3. Jumlah Anggota Tim 2 orang
a. Nama Muni Iestati Broto
b. Pangkat/golongan Pembina / IV/a
c. Jabatan/NIP Lektor Kepala/ 19600223 198603 2 001
d. Fakultas/Unit Kerja FISIP UT

- a. Nama Setyo Kusumo, S.S.M.A.
 b. Pangkat/golongan Penata Muda Tk.I/III/b
 c. Jabatan/NIP Asisten Ahli /197112141999031001
 d. Fakultas/Unit Kerja FISIP UT

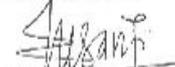
4. Lokasi Penelitian Kabupaten Demak
5. Waktu Penelitian 9 (sembilan) bulan
6. Biaya Penelitian Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)

Tangerang Selatan, 9 Desember 2014

Mengetahui,
Dekan FISIP


Prof. Daryono, S.H.,M.A.,Ph.D.
NIP.19640722 198903 1 019

Ketua Tim Peneliti


Dra. Susanti, M.Si.
NIP. 196712141993032002

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat




R. Krisnanti Ambar Puspitawati, M.Ed.,Ph.D.
NIP. 19610724 198710 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN DIAGRAM	iv
ABSTRAK	v
BAB 1. PENDAHULUAN	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB 3. METODE PENELITIAN	13
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
A. Dinamika Kabupaten Demak	17
B. Hasil Dan Pembahasan	23
C. Dampak Jaringan Aktor	32
D. Dampak Kontemporer Jaringan	34
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian.....	
Lampiran 2. Dukungan Sarana dan Prasarana	
Lampiran 3. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti.....	
Lampiran 4. Biodata Ketua dan Anggota	
Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Peneliti dan Tim Peneliti.....	
Lampiran 6. Anggaran Biaya	
Lampiran 7. Jadwal Penelitian	
Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian	

Kajian Actor-Network Theory Pemilihan Bupati di Kabupaten Demak

Dra. Susanti, M.Si. (susanti@ut.ac.id)
Dra. Mani Festati Broto, M.Ed. (mani@ut.ac.id)
Drs. Setyo Kuncoro, M.A. (kuncoro@ut.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peta jaringan aktor dan merekonstruksi kembali peta tersebut sehingga dapat menjelaskan dampaknya dalam pemerintahan. Studi ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat *cyclical*, dengan informan yang diambil secara *purposive* yang dalam prinsip teori jaringan aktor yang diprioritaskan adalah deskripsi peristiwa tanpa membedakan aktor manusia dan non aktor manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awalnya budaya terzalimi mampu menarik empati masyarakat pada aktor. Terkait dengan jaringan, aktor memanfaatkan jaringan kepemimpinan pemerintahan yang sudah dimiliki aktor sebelumnya serta menggunakan kendaraan partai politik, dalam hal ini PKB, PPP, PKS, dan Partai Golkar. Sedangkan pada periode masa jabatan yang kedua, *incumbent* memanfaatkan jaringan pemerintahan serta jaringan ulama, kyai, dan pondok pesantren karena kesamaan misi. Selanjutnya jaringan ulama, kyai, dan pondok pesantren ini berfungsi sebagai agen atau perantara dalam menerjemahkan misi untuk menarik suara rakyat. Jaringan ini tanpa melihat asal usul dari NU ataupun Muhammadiyah, dan menarik parpol Islam (PKB, PPP, dan PKS), serta partai nasionalis Golkar untuk bergabung. Jaringan ini kuat memperjuangkan aktor karena fasilitasi dan pelatihan peningkatan SDM yang diperoleh dari aktor.

KATA KUNCI : Aktor, Teori Jaringan Aktor, Budaya Terzalimi, Kuatnya Jaringan

Actor-Network Theory Study Selection of Regents in Demak

Dra. Susanti, M.Si. (susanti@ut.ac.id)
Dra. Mani Festati Broto, M.Ed. (mani@ut.ac.id)
Drs. Setyo Kuncoro, M.A. (kuncoro@ut.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to identify and map the network actors reconstruct the map so as to explain the impact of government. The study used qualitative methods are cyclical, with informants with purposive sampling which in principle priority actor network theory is a description of events without distinguishing human actors and non-human actors. The results showed that initially the culture of victimization able to draw on the public empathy actor. Associated with the network, the network utilizing the leadership of the government actors who already owned a previous actor and the use of vehicles of political parties, in this case PKB, PPP, PKS, and Golkar. Whereas the second term period, the incumbent network utilizing a network of government and scholars, clerics, and boarding school for a similar mission. Furthermore, the network of scholars, clerics, and boarding school serves as an agent or intermediary in translating the mission to attract the people's voice. This network without

seeing the origins of NU or Muhammadiyah, and attract Islamic political party (PKB, PPP, and MCC), as well as the nationalist party Golkar to join. The strong network of actors fighting for facilitation and training of human resources improvement obtained from the actor.

KEYWORDS: Actor, Actor Network Theory, Culture victimization, Robust Network

BAB I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dalam paradigma modern, demokrasi diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta memungkinkan terbentuknya stabilitas politik yang kuat karena adanya dukungan masyarakat. Upaya pemerintah Indonesia menjawab tuntutan masyarakat ini dengan cara menekankan pada bentuk reformasi politik melalui serangkaian kebijakan otonomi dan desentralisasi politik, serta mekanisme pemilihan kepala daerah agar terbentuk demokrasi lokal. Smith (1985) menyatakan bahwa desentralisasi memungkinkan aspek pemberdayaan masyarakat berjalan lebih maksimal. Serangkaian tuntutan reformasi politik pada tahun 1998 ini salah satunya diakomodasi dalam Undang-Undang No.22/1999 jo. Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui Pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak untuk masa jabatan 2011-2016 dimenangkan oleh pasangan bupati dan wakil bupati Drs. H. Tafta Zani,MM dan Drs. H. Moch.Dachirin Said, SH dengan memperoleh suara sah sebanyak 377.644 suara dan prosentase suara sah 74,38% dari 805.661 pemilih. Kemenangan pasangan Zani – Dachirin ini didukung oleh empat partai politik besar yaitu : Partai Golkar, PKS, PPP, dan PKB yang dilantik pada tanggal 3 Mei 2011 oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Bupati terpilih adalah bupati *incumbent* yang pada masa jabatan 2006-2011 berpasangan dengan Muhammad Asyiq. Bupati Tafta Zani meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2012, sehingga digantikan oleh Moch.Dachirin wakilnya yang kemudian diangkat menjadi Bupati. Selanjutnya pengisian kekosongan wakil bupati (wabup) Demak merupakan hak bupati dan partai pengusung. Sesuai PP No. 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa bupati mengajukan dua calon wabup atas usulan partai atau gabungan partai pengusung. Selanjutnya dalam pemilihan sampai pengesahan wabup baru dilaksanakan di DPRD, sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak tidak memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pemilihan wakil bupati. Chalid (2005)

menyatakan bagaimanapun pilkada langsung harus dipikirkan dampak dan implementasinya yang tidak hanya berhenti setelah pelantikan calon terpilih.

Berdasarkan profil DPRD Kab. Demak 2009-2014 maka berikut disampaikan komposisi parpol dan wakil rakyat dalam lembaga tersebut sbb.

**Tabel 1.1. Komposisi Partai Politik dan Jumlah Kursi
Pada DPRD Kab. Demak 2009-2014**

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	Hanura	1
2.	PKPB	1
3.	Gerindra	3
4.	PKS	5
5.	PAN	2
6.	PKB	10
7.	PDP	2
8.	Golkar	6
9.	PPP	5
10.	PDIP	8
11.	Demokrat	6
12.	PKNU	1
Jumlah		50

Sumber : <http://kpudemak.wordpress.com/> diakses tanggal 30 Januari 2013.

Jaringan aktor memegang peranan penting dalam proses pemilihan sampai dengan pengangkatan wabup dalam DPRD Kab. Demak. Riyanto (2013) menyebutkan bahwa jaringan aktor yang rusak dapat menyebabkan konflik. Zuhro (2013) memperkuat bahwa dalam pelaksanaan demokrasi lokal melalui pilkada menarik untuk diteliti, khususnya berkaitan dengan keragaman daerah dalam merespon tantangan yang dihadapi. Pelajaran yang dapat ditarik menurut Zuhro (2013), pelaksanaan pilkada di provinsi, kabupaten dan kota tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dari segi prosedur dan penyelenggaraan, sehingga tidak jarang memicu konflik politik di tingkat lokal. Namun demikian di beberapa daerah juga sudah menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat yang berkorelasi positif terhadap hasil pilkada yaitu terpilihnya pemimpin yang amanah. Bagaimanapun juga kelancaran dalam proses pemilihan bupati terkait erat adanya jaringan aktor yang dimiliki bupati, untuk itulah kajian jaringan aktor menarik untuk diteliti lebih lanjut.

2. RUMUSAN MASALAH

Jaringan aktor memegang peran penting dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kab. Demak. Ketidاكلancaran dalam proses pemilihan di DPRD akan berakibat tidak menentunya peta politik yang akhirnya akan berdampak pada kebijakan ataupun tatanan yang akan diusulkan dan dihasilkan oleh eksekutif daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana jaringan aktor dibangun oleh bupati dalam proses pemilihan kepala daerah? Penelitian ini ingin merekonstruksi kembali jaringan aktor yang telah dibangun oleh bupati Kab. Demak.

3. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud penelitian ini adalah ingin merekonstruksi kembali jaringan aktor yang dibangun bupati dalam proses pemilihan kepala daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi jaringan aktor yang dimiliki bupati dalam proses pemilihan kepala daerah;
- b. Merekonstruksi jaringan aktor yang dibangun oleh bupati dalam proses pemilihan kepala daerah.

4. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini sbb.

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pengembangan studi jaringan dalam pemilihan kepala daerah.

- b. Kegunaan praktis

Memberi masukan kepada pengambil kebijakan agar dalam mengimplementasikan kebijakan pemilihan kepala daerah dapat dirumuskan secara tertulis kontrak sosial antar jaringan yang dibangun.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah *network* dalam ilmu sosial, pertama kali dipakai tahun 1940an dan 1950-an untuk menganalisis dan mematahkan hubungan saling keterkaitan serta ketergantungan individu. *Network* mengandung arti : (1) adanya kontak untuk mendapatkan keuntungan dan (2) secara etimologis dari bahasa teknologi komputer yaitu komputer yang saling berhubungan (Parson, 2011: 186-187). Barnes dalam Agusyanto (2007) menyatakan bahwa pembahasan jaringan sosial tidak akan berakhir karena begitu kompleksnya jaringan yang saling tumpang tindih, oleh karenanya Barnes membedakan jaringan sosial yang kompleks dan jaringan partial yang hanya berisi satu jenis hubungan sosial. Beberapa pakar sosiologi dan anthropologi membedakan jaringan sosial menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Jaringan interest sebagai hubungan sosial yang bermuatan kepentingan.
2. Jaringan power sebagai hubungan sosial yang membentuk jaringan bermuatan *power*. *Power* dalam hal ini menurut Adams dalam Agusyanto (2007) diartikan sebagai kemampuan seseorang atau unit sosial untuk mempengaruhi perilaku dan pengambil keputusan melalui pengendalian.
3. Jaringan *sentiment* (emosi) sebagai hubungan sosial yang membentuk jaringan bermuatan emosi. Struktur sosial yang terbentuk dari hubungan emosi ini umumnya lebih mantap dan permanen, seperti : hubungan kerabat, pertemanan, dsb.

Ketiga jenis jaringan sosial ini pada prakteknya saling bertumpang tindih, sehingga seringkali terjadi hal yang kontradiktif antara tindakan dan sikap yang pelaku wujudkan.

Pertautan perkembangan teknologi dengan jejaring sosial, berdampak pada hubungan sosial yang tidak hanya tergantung pada faktor manusia tetapi juga infrastruktur yang memadai yang kemudian menginspirasi Callon dkk. melahirkan *Actor-network Theory* (ANT) pada 1980.

A. *Actor-network Theory* (ANT)

ANT atau teori jaringan aktor merupakan sebuah pendekatan dalam teori sosial dan penelitian yang memperlakukan benda sebagai bagian dari jaringan sosial. Kapasitas non manusia ikut menentukan sistem dan atau jaringan. ANT dikembangkan pertama kali tahun 1980 di Perancis oleh Michel Callon, Bruno Latour, dan John Law, dapat lebih teknis digambarkan sebagai metode "material-semiotik". Artinya ada peta materi dan semiotik (konsep) dalam hubungan yang simultan. Pendekatan ini tidak berusaha untuk menjawab benar atau salah untuk sebuah peristiwa, melainkan berusaha memberikan penjelasan untuk

memahami kombinasi dan interaksi di antara unsur-unsur yang ada. Oleh karenanya ANT termasuk pendekatan konstruktivis.

Pada tahun 2008, ANT telah meluas penggunaannya bukan hanya di bidang sains dan teknologi saja tetapi sudah merambah ke organisasi, informatika, studi kesehatan, geografi, sosiologi, antropologi, gender dan ekonomi. ANT ini sengaja digunakan dalam penelitian ini. Ada beberapa hal penting dalam ANT ini sebagaimana dikemukakan Bruno Latour (2005) sbb.

1. Sebuah Metode Material-Semiotik

Walaupun disebut teori, ANT tidak menjelaskan mengapa dan bagaimana jaringan terbentuk; sebaliknya ANT adalah cara yang sebenarnya untuk mengeksplorasi hubungan relasional dalam jaringan sehingga dalam hal ini ANT juga berperan sebagai sebuah metode. Sebaliknya, ANT merupakan sebuah cara untuk benar-benar mengeksplorasi hubungan relasional dalam jaringan. Lebih lanjut Latour (2005) mengemukakan bahwa penjelasan tsb. tidak harus berbentuk deskripsi, walaupun deskripsi dapat digunakan. Oleh karena itu seringkali bukan saja disebut teori, tetapi juga metode dan acuan.

Pendekatan ANT ini sering dikaitkan dengan versi lain material-semiotik. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk membangun kepercayaan terhadap *ethnomethodology* yang mendeskripsikan secara rinci bagaimana aktivitas bersama, kebiasaan dan prosedur dipertahankan. Ada kesamaan antara ANT dan pendekatan interaksi simbolik sebagai bentuk baru dari *Grounded Theory* seperti analisis situasional yang keberadaannya sebagai sebuah perbandingan.

2. Jaringan Aktor

Konsep yang paling utama dalam ANT adalah jaringan aktor. Konotasi jaringan aktor adalah sbb.

1. Menunjukkan bahwa apa yang digambarkan mengambil bentuk jaringan, yang kenyataannya belum tentu demikian.
2. Tidak memiliki apriori dalam bentuk hubungan, tidak terikat dengan mitos yang ada baik dari kalangan atas (elit) ataupun bawah (masyarakat), serta tidak terikat asumsi makro/mikro yang berkembang.

Teori jaringan aktor mencoba untuk menjelaskan bagaimana asal jaringan material-semiotik bersama-sama untuk bertindak sebagai keseluruhan; kelompok aktor yang terlibat dalam menciptakan makna (baik material dan semiotik). ANT secara eksplisit berusaha

menghubungkan unsur-unsur yang berbeda bersama-sama menuju jaringan, sehingga membentuk satu kesatuan yang tampaknya koheren. Jaringan ini bisa bersifat sementara atau tetap, tergantung intensitas hubungan yang dilakukan atau sebaliknya, justru jaringan yang akan larut. Bruno, Latour, dan Law juga menganggap bahwa dalam jaringan hubungan secara instrinsik dapat tidak koheren, sehingga dimungkinkan terjadi konflik. Proses hubungan sosial ini harus dilakukan terus menerus.

Konsep lainnya yang juga penting adalah adanya aktan. *Aktan* menunjuk pada tindakan atau pelaku baik itu manusia, non-manusia, ataupun jaringan yang memainkan peranan aktif sebagai bentuk yang menggambarkan hubungan satu sama lain. Hal ini mengasumsikan bahwa tidak ada segala sesuatu yang berada di luar jaringan hubungan, sehingga diasumsikan tidak ada perbedaan dalam kemampuan teknologi, manusia, hewan, atau di luar non-manusia untuk melakukan tindakan (atau gabungan unsur tersebut). Dengan demikian seorang aktor yang terlibat dalam jaringan-aktor juga terjebak dalam jaringan hubungan, dan menjadi bagian dari hubungan itu.

Kesimpulan logisnya, setiap aktor menjadi bagian kecil bagi sekumpulan aktor. Sebagai contoh, sistem kompleks yang ada pada sebuah mobil yang terdiri dari sejumlah komponen elektronik dan mekanik yang pada dasarnya tersembunyi dari pandangan pengemudi. Pengemudi hanya berurusan dengan mobil sebagai objek tunggal. Efek ini dikenal sebagai *punctualisation* (ketepatan waktu), dan ini mirip dengan ide abstraksi dalam pemrograman berorientasi-objek.

Ketika jaringan aktor rusak, efek *punctualisation* cenderung berhenti juga. Dalam bukunya *Pandora Hope*, Latour menyamakan *depunctualization* (ketidaktepatan waktu) sebagai sebuah *black box*. Ketika ditutup, kotak terlihat sederhana namun ketika dibuka terlihat semua elemen di dalamnya.

3. Aktor Manusia dan Non-Manusia

Konsep aktor manusia dan non-manusia juga memegang peran penting dan perlakuan yang sama dalam ANT. ANT mengasumsikan bahwa semua entitas dalam jaringan dapat dan harus dijelaskan dengan istilah-istilah yang sama atau disebut prinsip *generalized symmetry* (simetri umum). Mengapa? Sebab perbedaan di antara mereka dihasilkan dalam jaringan hubungan, sehingga tidak diperbolehkan ada pengecualian.

Dalam konsep aktor manusia dan non-manusia, ada perbedaan antara Perantara (*Intermediaries*) dan Mediator. Perantara adalah entitas yang tidak membuat perbedaan.

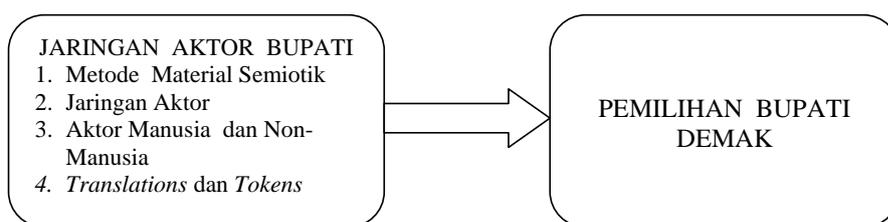
Perantara membawa kekuatan beberapa entitas lain tanpa perubahan sehingga menjadi kajian cukup menarik. Sedangkan mediator adalah entitas yang melahirkan banyak perbedaan, *output* mediator tidak dapat diprediksi dengan masukannya. Dalam melakukan analisis ANT; perbedaan kelas sosial, kelompok dan kekuasaan harus dibangun melalui keterlibatan kompleks dengan mediator yang kompleks pula. Tidak ada *repertoar* (khasanah) sosial yang berdiri sendiri.

4. Konsep Penting Lain

Konsep penting lainnya adalah *translation* (penterjemahan), dan *tokens* (bukti/tanda) atau objek semu. Dalam *translation*, di mana inovator berupaya menciptakan sebuah forum sebagai jaringan sentral dengan persetujuan semua aktor untuk membangun dan mempertahankan jaringan sentral tersebut. Dalam hal ini, Callon menetapkan adanya empat peristiwa yang berkaitan dengan *translation*, yaitu : problematisasi, kepentingan, pendaftaran dan mobilisasi aliansi.

Berkaitan dengan contoh, Callon menyatakan bahwa "tatanan sosial" dan "pemanfaatan *mobile*" dapat terwujud melalui interaksi yang lancar dari masing-masing jaringan-aktor, dan teori jaringan-aktor mengacu pada kreasi ini sebagai *token* atau objek semu yang dilalui oleh aktor-aktor dalam jaringan. Artinya semakin melewati jaringan maka menjadi semakin *punctualized* (tepat waktu) dan semakin dipertimbangkan. Sebaliknya, ketika *token* berubah semakin menurun, maka seorang aktor gagal untuk mengirimkan *token*, ketepatan waktu dan pertimbangan juga semakin menurun.

B . KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber : Latour (2005)

BAB III. METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini sengaja mengambil tempat di Kab. Demak mengingat Kab. Demak merupakan daerah pantai yang secara geografis termasuk daerah kering sehingga dibanding dengan kab/kota lainnya di Jawa Tengah pada masa Orde Baru termasuk daerah miskin. Kab. Demak juga mempunyai PAD terendah dibanding dengan kab/kota lainnya di Jawa Tengah, namun di sisi lain termasuk kota yang paling religius. Kereligiousan masyarakat ini terkait erat dengan sejarah sebagai kota wali, di mana di Kab. Demak berdiri Masjid Agung Demak (salah satu masjid tertua di Indonesia) yang dibangun oleh Wali Songo. Kab. Demak sebagai kota wali, pengaruh kyai sangat terasa dalam kehidupan masyarakat yang sangat religius. Perkembangan pada tahun 2013, mencatat bahwa Kab. Demak termasuk daerah yang mendapat alokasi terbesar bantuan keuangan dari propinsi yaitu sebesar Rp. 130 miliar (dari Rp. 1,7 triliun) dengan mayoritas penggunaan untuk membiayai pemeliharaan jalan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan jaringan aktor dan menemukan rekomendasi untuk membuat solidaritas jaringan aktor yang baik dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan prinsip ANT dengan menekankan pada deskripsi peristiwa atau fenomena tanpa membedakan aktor manusia dan non-manusia. Sedangkan obyek penelitian ini dibatasi pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Demak.

Peneliti menggunakan desain kualitatif karena hendak memahami makna atas fenomena empirik dengan cara konstruktivis-interpretatif (Guba dan Lincoln: 1985) bukan hendak menunjukkan hubungan antarvariabel, menguji teori, atau mencari generalisasi.

B. INFORMAN

Pemilihan *informan* dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive* dan metode *snowball*, artinya siapa yang menjadi *informan* sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria atau alasan tertentu dari beberapa titik. Hal ini bertujuan untuk menjaga obyektivitas penelitian. Informan dalam penelitian ini akan diambil dari beberapa titik, yaitu : bupati sendiri, tim sukses bupati, elit parpol, dan akar rumput yang berpengaruh. Proses *snowball* ini akan dihentikan bila peneliti merasa sudah menemukan aktor *network* bupati.

Formatted: Font: Italic

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari informan, dan pengumpulan data akan dihentikan ketika data yang diperoleh sudah jenuh. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu berupa penelusuran kepustakaan berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan pemilihan kepala daerah serta dokumen atau sumber sejarah yang telah tersusun dalam arsip. Kedua sumber data kemudian digabungkan dan dilakukan analisis sistematis untuk merekonstruksi ANT dalam pilkada Kab. Demak.

Adapun dalam memperoleh data sekunder maka topik penelitian diturunkan menjadi dimensi dan indikator dalam penelitian sbb.

No.	Pertanyaan	Dimensi	Indikator	Teknik Pengumpulan Data
1.	Identifikasi jaringan aktor dan Konstruksi jaringan aktor	1. Metode material semiotik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan relasional dalam jaringan 2. Bagaimana aktivitas bersama dilakukan 3. Bagaimana kebiasaan dan prosedur dipertahankan 	Wawancara dan studi dokumen.
		2. Jaringan aktor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana asal jaringan terbentuk dan bertindak 2. Mengapa jaringan harus dibentuk 3. Bagaimana kelompok aktor yang terlibat menciptakan makna (material dan semiotik) 4. Bagaimana hubungan unsur-unsur yang berbeda bersama-sama menuju jaringan 5. Bagaimana instensitas hubungan sosial dilakukan 	Wawancara dan studi dokumen.
		3. Aktor manusia dan non-manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa seseorang bersedia bergabung dalam jaringan? 2. Bagaimana aktor manusia berperan? 3. Bagaimana aktor non-manusia berperan? 4. Bagaimana aktor menyampaikan masukan? (tetap atau dengan penambahan-penambahan) 5. Bagaimana peran aktor dalam mengatasi perbedaan kelas sosial? 6. Bagaimana peran kelompok dan kekuasaan dalam jaringan? 	Wawancara dan studi dokumen.
		4. <i>Translation</i> dan <i>Tokens</i>	<p><i>Translation</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana problematika diselesaikan? 2. Bagaimana kepentingan diakumulasi? 3. Bagaimana cara merekrut dan memobilisasi anggota/kelompok? <p><i>Tokens</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketepatan waktu dibangun? 	Wawancara dan studi dokumen.

Formatted: Not Strikethrough

D. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Data yang sudah terkumpul digabungkan dan dilakukan analisis sistematis. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *cyclical*, artinya ~~sehingga dapat ditemukan konsepsi kebangsaan di kalangan wong cilik~~ analisis dan interpretasi data dilakukan secara berulang dan dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini maka pada saat pengumpulan data langsung dilakukan analisis dan interpretasi, selanjutnya mengumpulkan data lagi dan langsung dilakukan analisis dan interpretasi lagi. Demikian hal ini dilakukan begitu seterusnya sampai peneliti merasa sudah menemukan aktor *network bupati*. Setelah melakukan analisis dan interpretasi secara komprehensif, diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan implikasi penelitian ini terhadap sistem politik Indonesia terutama dalam pemilihan kepala daerah. Setelah itu baru melakukan proses penarikan kesimpulan.

Formatted: Font: Italic

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DINAMIKA KABUPATEN DEMAK

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan batas wilayah sbb. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Dilihat dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut (elevasi), wilayah ini terletak dari 0 sampai dengan 100 meter dari permukaan laut; artinya hampir seluruh wilayah kabupaten ini terletak di dataran rendah.

Secara administratif, luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha, terdiri atas 14 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan dengan peta sebagaimana pada Gambar 4.1.berikut.

GAMBAR 4.1. PETA KABUPATEN DEMAK



Sumber : Demak Dalam Angka 2012, demakkab.go.id.

Enam kelurahan tersebut terdapat di Kecamatan Demak dan gambaran terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN, DUSUN, RW, dan RT
Di KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012

Kecamatan <i>Districts</i>	Desa	Kelu- rahan	Dusun	RW	RT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
01. Mranggen	19	0	65	154	1 066	
02. Karangawen	12	0	57	146	610	
03. Guntur	20	0	65	85	527	
04. Sayung	20	0	0	103	493	
05. Karangtengah	17	0	72	70	349	
06. Bonang	21	0	29	113	548	
07. Demak	13	6	39	106	629	
08. Wonosalam	21	0	0	104	527	
09. Dempet	16	0	48	63	363	
10. Gajah	18	0	10	68	409	
11. Karanganyar	17	0	35	63	425	
12. Mijen	15	0	22	61	284	
13. Wedung	20	0	26	102	441	
14. Kebonagung	14	0	44	51	246	
<i>Jumlah/Total</i>	2012	243	6	512	1 289	6 917
	2011	243	6	512	1 289	6 917
	2010	243	6	512	1 289	6 917
	2009	243	6	512	1 278	6 720
	2008	243	6	512	1 267	6 327
	2007	243	6	512	1 262	6 326

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Demak

Sumber : Demak Dalam Angka 2012, demakkab.go.id.

Berdasar hasil registrasi 2012, dari sisi kependudukan tercatat jumlah penduduk Kabupaten Demak sebanyak 1.092.622 orang terdiri dari 542.879 laki-laki (49,69%) dan 549.743 perempuan (50,31%). Sebagian besar penduduk (68,19%) berada pada usia produktif (15-64 tahun), sedangkan selebihnya yaitu 26,02% berusia di bawah 15 tahun dan 5,78% berusia 65 tahun keatas. Dampak dari struktur penduduk demikian adalah, angka

ketergantungan yang besar yaitu 466,39; artinya setiap 1000 orang berusia produktif menanggung sekitar 466 orang penduduk usia non produktif.

Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2012 mencapai 1.218 orang/km². Penduduk terpadat di Kecamatan Mranggen dengan kepadatan 2.268 orang/km², sedangkan penduduk paling jarang berada di Kecamatan Wedung dengan 718 orang/km². Perkembangan kinerja perekonomian Kabupaten Demak pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun 2011, yaitu dari 4,48% menjadi 4,64% di mana semua sektor ekonomi mengalami peningkatan (tumbuh positif). PDRB tahun 2012 juga mengalami kenaikan 4,64%, yaitu dari 3.156,13 milyar rupiah pada tahun 2011 menjadi sebesar 3.302,61 milyar rupiah tahun 2012. Sedangkan PDRB perkapita juga mengalami peningkatan dari 6,16 juta rupiah pada tahun 2011 menjadi 6,77 juta rupiah pada tahun 2012 atau naik 9,78%. Sektor pertanian masih memberikan sumbangan terbesar (44%) terhadap pembentukan PDRB, di samping sektor besar lainnya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran (18,33%), sektor jasa-jasa (11,98%), dan sektor industri pengolahan (9,89%), dll. Artinya sektor pertanian masih menjadi andalan utama pemerintah untuk membentuk PDRB, sehingga sektor ini perlu diperkuat dan diberdayakan.

Pada sisi peta politik, Pemilu Legislatif 2009 telah memilih 50 anggota DPRD Kab. Demak, yang terdiri atas 7 fraksi dengan rincian sebagaimana Tabel 4.2. berikut.

TABEL 4.2. DPRD KABUPATEN DEMAK HASIL PEMILU 2009
MENURUT FRAKSI DAN JENIS KELAMIN

Fraksi	Laki-Laki	Pereempuan	Jumlah
<i>Fraksi</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Fraksi PKB	8	2	10
02. Fraksi PDI-P	6	2	8
03. Fraksi Partai Golkar	5	1	6
04. Fraksi PD	5	3	8
05. Fraksi PKS	5	-	5
06. Fraksi PPP	5	-	5
07. Fraksi Gabungan	7	1	8
Jumlah/Total			
2012	41	9	50
2011	41	9	50
2010	41	9	50
2009	41	9	50
2008	40	5	45
2007	39	5	44

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Demak

Sumber : Demak Dalam Angka 2012, demakkab.go.id.

Dengan jumlah pemilih yang memberikan suara sebanyak 571.998 pemilih, berarti tingkat partisipasi politik masyarakat pada pileg 2009 adalah 73% dan ada 211.561 pemilih atau 27% pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pileg 2009. (Sumber: kpudemak.wordpress.com/2010/03/30/demak-memilih-dan-hasil-pileg-2009). Hal ini berarti bahwa seorang anggota DPRD mewakili 11.440 konstituen. Keanggotaan DPRD Kab. Demak dalam ketujuh fraksi tersebut terbagi dalam empat komisi, yaitu: Komisi A sebanyak 10 orang, Komisi B sebanyak 11 orang, Komisi C sebanyak 13 orang, dan Komisi D sebanyak 12 orang. Adapun produk/keputusan yang telah diambil atau dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Demak selama tahun 2012 sbb.

TABEL 4.3. PRODUK/KEPUTUSAN DPRD
di KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012

Bulan <i>Month</i>	Perda	Kepu- tusan DPRD	Keputusan Pimp. DPRD	Keputusan Badan Musy.	Pendpt & Saran Bdn Anggaran	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
01. Januari	0	2	0	1	2	5	
02. Pebruari	1	5	1	1	1	9	
03. Maret	0	1	0	2	0	3	
04. April	0	1	0	1	0	2	
05. Mei	0	0	0	0	0	0	
06. Juni	0	5	0	1	0	6	
07. Juli	0	3	0	1	1	5	
08. Agustus	2	2	1	1	1	7	
09. September	0	0	0	2	1	3	
10. Oktober	1	5	2	2	3	13	
11. Nopember	3	2	0	0	1	6	
12. Desember	1	8	1	3	2	15	
<i>Jumlah/Total</i>	2012	8	34	5	15	12	74
	2011	15	38	3	15	10	81
	2010	6	32	11	13	18	80
	2009	13	20	11	4	10	58
	2008	10	20	14	8	9	61
	2007	16	23	18	10	14	81

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Demak

Sumber : Demak Dalam Angka 2012, demakkab.go.id.

Adapun pada sisi pemerintahan, pemilihan bupati 2011 bertujuan untuk memilih bupati/wabup Demak yang ke-11 yang akhirnya dimenangkan oleh *incumbent*. Berikut disampaikan pemimpin pemerintahan Kab. Demak sebagaimana Tabel 4.4. berikut.

TABEL 4.4. PEMIMPIN PEMERINTAHAN KABUPATEN DEMAK

No.	Nama	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Keterangan
1.	Doemami,SH	1978	1984	
2.	Drs. Moch. Adnan Widodo	1972	1973	
3.	Drs. Winarno Surya Adi Subraya	1978	1984	
4.	Drs. H. Soedomo	1978	1984	
5.	Kol. E. Sumartha	1984	1985	
6.	Drs. Waluyo Cokrodarmanto	1985	1986	
7.	Kol. H. Soekarlan	1986	1996	
8.	Kol. H. Djoko Widji Suwito, SIP.	1996	2001	
9.	Dra. Hj. Endang Setyaningdyah, MSi.	2001	2006	
10.	Drs. H. Tafta Zaini,MM.	2006	2012	Meninggal dunia saat bertugas pada periode kedua
11.	Drs. H. Dachirin Said, M.Si	2012	Sekarang	Bertugas hingga 2016 melanjutkan pejabat sebelumnya

Sumber : id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Demak.

Pemilihan bupati 2011 diikuti oleh empat pasangan calon bupati dan wabup dan tidak ada calon independen, artinya semua pasangan didaftarkan oleh partai politik. Berdasarkan hasil Pilbup 2011 dengan tingkat partisipasi politik 65% diperoleh suara sah sebanyak 438.294 suara dan ada 10.583 suara tidak sah dengan hasil sbb.: (1) Pasangan Tafta-Dachirin memperoleh 242.878 suara atau 72,94%, (2). Pasangan Saidah-Haryanto memperoleh 47.937 suara atau 14,46%, (3). Pasangan Nadjib-Azzah memperoleh 29.102 suara atau 8,74%, dan (4) Pasangan Maryono-Purnomo memperoleh 13.050 suara atau 3,92%) (Sumber: kpudemak.wordpress.com/2011/03). Pilbup yang berlangsung hanya satu putaran, akhirnya memenangkan pasangan Tafta-Dachirin yang dilantik pada tahun 2011.

Bila pada masa Orde Baru kantor sosial politik memperoleh tempat yang utama oleh penguasaan, maka sekarang keberadaan Kantor Kesbangpol Linmas dapat dikatakan dinomor duakan. Artinya dari segi fungsi dibutuhkan ketika mengamankan pemilu dan memprediksi dinamika perpolitikan di daerah, namun secara fisik keberadaannya dinomor duakan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi fisik bangunan Kantor Kesbangpol Linmas yang masih berupa bangunan semi permanen.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. METODE MATERIAL SEMIOTIK

Sebuah jaringan terbentuk melalui hubungan relasional. Terkait dengan jaringan yang dibentuk oleh Dachirin di birokrasi pemerintahan, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan bupati sebelumnya yaitu Zani. Sebagaimana diungkapkan dari hasil wawancara dengan informan 1 sbb.

“ Ketika bu Endang menjadi Bupati, Pak Zani ini adalah Sekda sekitar dua tahunan. Hubungan keduanya baik, mungkin awalnya sudah merasa kenal, sebab sebelumnya bu Endang adalah PNS-bidan di Karang Tengah dan pak Zani adalah Sekcam di Karang Tengah. Sering kegiatan di tingkat kecamatan ini kan melibatkan puskesmas kecamatan dan desa-desa di wilayah tsb. Jadi keduanya ketika bertemu lagi sebagai bupati dan sekda sebenarnya sudah biasa bekerja sama. Namun nampaknya ketika memasuki tahun ke-3 bupati tidak merasa cocok, sehingga sekda di non job kan. Mengingat pak Zani itu di Demak sudah dikenal, dari sekcam terus lanjut camat sampai menjadi sekda, tentu beliau sudah terbiasa memimpin, apalagi ybs alumni APDN. Dengan Pesantren beliau juga dekat, apalagi Demak ini kan dikenal sebagai Kota Wali, jadi beliau itu luwes, kemana-mana dapat diterima”.

Informasi ini juga dipertegas dengan informan ke-2 yang menyatakan sbb.

“.....bahwa Pak Zani ini pengalamannya sangat banyak di birokrasi. Pernah menjadi Asisten 1 Pemerintahan, jadi sangat mumpuni. Ketika bersentuhan dengan politik, mungkin awalnya ada kekurangharmonisan; sebab bu Endang itu kan pengusaha jadi inginnya semua serba cepat; sehingga menjadikan ritme kerjanya dengan sekda menjadi kurang harmonis yang kemudian di non job kan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan relasional Zani dalam birokrasi, kemasyarakatan, ataupun pondok pesantren awalnya dibangun karena tugasnya selaku aparat pemerintah yang memang dekat dengan masyarakat. Tugas Bupati Zani sebagai mantan sekcam, camat, asisten 1 pemerintahan berkewajiban dekat dengan aparat pemerintahan di bawahnya dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan inilah yang seringkali menjadi pemicu untuk melakukan aktivitas bersama. Apalagi mengingat aktivitas bersama tersebut dilakukan pada masa Orde Baru. Bukan hal yang mustahil, bahwa sebagai mantan sekcam, camat, asisten 1 pemerintahan termasuk orang yang berpengaruh bagi aparat birokrasi di tingkat bawahnya. Memang awalnya hubungan tersebut terbatas untuk memperlancar kegiatan pemerintahan, namun ketika

ybs.pensiun maka dengan mudah yang bersangkutan menjalin komunikasi yang sudah ada. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan ke-2 sbb.

“.....ketika menjadi sekda kan tidak boleh berpolitik. Tetapi setahun setelah di non job kan, beliau pensiun; dan kemudian mencalonkan diri sebagai wakil bupati kalau tidak salah yang mendaftarkan PKB”.

Dengan demikian aktivitas bersama ini awalnya pada lingkup kepemimpinan birokrasi, sehingga setelah yang bersangkutan tidak menjabat pemimpin birokrasi maka jaringan birokrasi yang sudah dibangunnya akan mudah dijalin kembali. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam PP No. 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 5 Tahun 1999 tentang PNS yang Menjadi Anggota Partai Politik Pasal 8 yang secara eksplisit menyatakan bahwa seorang PNS tidak boleh menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; dengan tujuan agar birokrasi netral, melayani semua kepentingan masyarakat, dan pelayanan yang diberikan tidak diwarnai dengan konflik kepentingan. Dengan demikian kepemimpinan politik Bupati Zani awalnya dibangun dari kepemimpinan birokrasi, dan ketika memasuki kepemimpinan politik maka prosedur atau aturan yang berlaku sesuai ketentuan tetap diikuti yang bersangkutan.

Terkait dengan kepemimpinan bupati Endang, ketika yang bersangkutan mencalonkan kembali pada periode ke-2 kalah suara dengan Zani. Hal ini dijelaskan oleh informan 1 sbb.

“Ketika bu Endang menjadi Bupati, seharusnya sebagai orang yang awalnya juga PNS-Bidan di Demak sebenarnya sudah saling kenal. Mungkin karena kemudian ybs.menjadi pengusaha, maka menjadi lain dengan teman-temannya. Bahkan perkumpulan bidan demak waktu menghadap bupati, tidak ada basa-basi sama sekali. Bahkan katanya begitu pengurus masuk, beliau hanya memberi waktu 3 menit sebab sibuk. Cerita ini kan kemudian tersebar, jadi orang sudah tidak mau dekat-dekat lagi. Banyak orang yang sakit hati padanya, termasuk pak Sekda yang di non job kan. Kalau yang mencalonkan dua, tentunya orang akan memilih selain bu Endang”.

Mungkin secara prosedur, tidak ada yang dilanggar oleh Bupati Zani, namun budaya masyarakat yang senantiasa berpihak pada kalangan lemah, terzolimi, dan perlu dibela ini mampu memobilisasi dukungan rakyat. Pada pencalonan Bupati Zani yang kedua, incumbent berusaha memperkuat basis dukungan di kalangan ulama, kyai, dan pondok pesantren dengan berpasangan dengan Dachirin.

Dachirin sendiri adalah mantan PNS Kementerian Agama di Semarang, dengan job terakhir sebagai widyaiswara. Dachirin putra asli Demak dan memang yang bersangkutan sangat dekat dengan lingkungan ulama, kyai, dan pondok pesantren. Di kalangan birokrasi di luar kementerian agama, awalnya yang bersangkutan kurang dikenal. Kombinasi antara Zani

dan Dachirin dan dukungan empat parpol besar (PKB, PPP, PKS, dan Partai Golkar), mampu mengantarkan *incumbent* menjadi pemenang pilkada Demak 2011-2016.

2. JARINGAN AKTOR

Slogan utama kota Demak adalah Kota Wali. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat peran ulama dalam pondok pesantren sangat mempengaruhi sumber daya yang dimiliki aktor. Sebagaimana diungkapkan oleh informan 2 sbb.

“ Perkumpulan ulama dalam pondok pesantren ini dalam pertemuannya tentu membahas dukungan pada cabup tertentu dalam pilkada. Sebagaimana dukungan yang diberikan kepada Pak Zani, apalagi beliau ini mantan Sekda yang dekat dengan masyarakat dan dizalimi oleh bupati sebelumnya bu Endang. Setelah Pak Zani pada jabatan kedua meninggal, dan digantikan oleh Pak Dachirin, hubungan dengan ulama tetap terjaga dengan baik. Mengingat Pak Dachirin sendiri mantan widyaiswara Departemen Agama yang tentunya mempunyai komunikasi yang sangat baik dengan para kyai, ulama, dan kalangan pondok meskipun Beliau tidak berafiliasi ke parpol tertentu”.

Terkait dengan hal ini maka klaim sumber daya utama bupati Zani maupun penggantinya Dachirin adalah kalangan kyai, ulama, atau pondok pesantren. Meskipun dukungan sumber daya kedua aktor tersebut tidak dalam bentuk posisi atau jabatan tertentu dalam pondok pesantren, majelis taklim, atau lembaga keagamaan sejenisnya, namun sumber daya yang diakumulasi keduanya memanfaatkan jaringan komunikasi yang dimilikinya ketika posisi kedua aktor sebagai PNS yang secara tugas, kewajiban, dan fungsinya bersentuhan atau berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Posisi sebelumnya bagi Zani sebagai Sekda tentunya sangat memahami benar tata kelola Pemda, sehingga dimungkinkan sangat didukung oleh kalangan birokrasi. Sedangkan basis dukungan Dachirin adalah kalangan ulama. Perpaduan antara image terzalimi ketika pencalonan awal Zani pada periode 2006-2011, dan sumber daya yang dimiliki aktor Dachirin mampu memenangkan pencalonan pasangan ini sebagai bupati Demak pada periode 2011-2016.

Berdasarkan data tersebut, ternyata image sebagai terzalimi menggugah empati masyarakat untuk memilihnya, sedangkan kinerja ketika menjadi Sekda bukan merupakan pertimbangan utama. Masyarakat lebih berpihak kepada individu yang terzalimi/lemah ketimbang kinerja pejabat publik. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan 1 sbb.

“ dalam memilih pemimpin masyarakat tidak melihat apakah ybs sebelumnya berasal dari PNS atau tidak. Kalau dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya yaitu masa bu Endang, justru Bu Endang itu lebih banyak kontribusinya, mungkin karena ybs seorang pengusaha, jadi geraknya cepat; misalnya : membangun jalan lingkar

luar, membangun pantai Morosari sebagai daerah rekreasi, tempat bermain anak, pengemukan sapi di kecamatan Gajah, dll. dibanding pak Zani. Cuma sayangnya, program yang baik tersebut tidak berlanjut. Mungkin untuk pengemukan sapi memang tidak pas, tapi yang lainnya seharusnya bisa berlanjut”.

Hal ini mengingatkan kita pada peta perpolitikan yang terjadi di tingkat nasional. Ketika itu SBY mengundurkan diri sebagai kabinet Megawati karena merasa terzalimi, dan mendirikan Partai Demokrat yang akhirnya mengantarkan SBY sebagai Presiden RI melalui Pilpres yang pertama. Di tingkat lokal, ternyata faktor terzalimi ini mampu merebut dukungan masyarakat sebagai modal awal sumber daya seseorang dalam pencalonan sebagaimana dialami oleh Zani ketika “dibuang” oleh bupati Endang dari Sekda dalam non job. Ternyata budaya terzalimi ini mampu digunakan untuk memobilisasi massa atau untuk keperluan lain seperti membangun karisma pribadi atau kompetensi dalam situasi tertentu pula.

Pada periode kedua 2011-2016, berpasangan dengan Dachirin yang mempunyai basis dukungan kyai, ulama, dan pondok pesantren memainkan peran penting. Aktor akan selalu menduduki posisi atau turun dengan klaim sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya ini tidak dalam bentuk posisi dalam partai tertentu atau organisasi keagamaan, tetapi bagaimana pasangan Zani dan Dachirin ini menggunakan jaringan komunikasi yang dimilikinya untuk membangun dukungan. Jaringan ulama yang telah intensif membangun komunikasi dengan Dachirin, merupakan sumber daya utama, sebab jaringan ulama inilah yang akan memobilisasi para santrinya untuk mendukung calon tertentu.

Jaringan ulama yang tergabung dalam Muhammadiyah dan NU merupakan basis dukungan utama yang kemudian terafiliasi dalam PKB, PPP, PKS, serta koalisi dengan parpol nasionalis yaitu Partai Golkar, menjadi non-aktor manusia yang memainkan peran penting dalam pencalonan Zani/Dachirin. Dalam hal ini, faktor parpol bukanlah hal yang utama, tetapi faktor Muhammadiyah dan NU dalam jaringan ulama lah yang memainkan peran sentral. Hal ini senada dengan pernyataan Informan 1, 2, dan 3 yang pada intinya menyatakan bahwa di tingkat kabupaten, jaringan ulama ini setiap tiga bulan sekali mengadakan rapat bersama dengan pemerintah dalam “Komunikasi Ulama dan Umara” sehingga koordinasi yang dibangun antara pemerintah dan ulama sangat baik. Sarana ini juga digunakan sebagai sarana untuk sosialisasi program pemerintah dan permohonan dukungan dari para ulama. Sedangkan di tingkat kecamatan, “Komunikasi Ulama dan Umara” diadakan setiap empat bulan sekali, demikian pula di tingkat desa komunikasi tersebut berlangsung intensif.

Selain itu, Perkumpulan Pondok Pesantren juga merupakan sarana untuk membangun komunikasi yang intensif antara aktor dengan ulama. Sebab dalam setiap kegiatan, aktor senantiasa memberikan bantuan baik dalam bentuk pelatihan SDM Pondok Pesantren ataupun lainnya. Aktor adalah semua elemen yang terikat ruang, mengikat unsur-unsur lain, dan mengubah keinginan menjadi satu yaitu mendukung aktor tertentu. Jaringan ulama, kyai, dan pondok pesantren membuat unsur-unsur lain yaitu parpol memiliki hubungan.

Jaringan ulama, kyai, dan pesantren meskipun tidak bersadndar pada parpol tertentu, tetapi parpol Islam seperti PKB, PPP, dan PKS menggunakan wadahnya untuk meyakinkan aktor dalam menyelaraskan dengan kepentingan mereka yang berbasis ideologi parpol. Ketika proses persuasif menjadi efektif, maka akan menciptakan jaringan aktor. Artinya bahwa jaringan aktor terbentuk ketika ada pemahaman antar aktor melalui proses meyakinkan aktor-aktor lain (ulama, kyai, pondok pesantren, parpol) bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama yang digabungkan dalam sebuah misi baru dengan mengumpulkan suara rakyat untuk aktor tertentu (Zani/Dachirin) agar dapat mendukung kepentingan mereka selanjutnya. Sebagaimana informan 1 menyatakan bahwa dalam masa jabatan Zani maupun Dachirin, keduanya banyak membantu kegiatan pondok pesantren, baik secara fisik dengan perbaikan fasilitas pesantren ataupun pelatihan-pelatihan unuk meningkatkan kompetensi dan SDM pondok pesantren.

Jaringan ulama, kyai, dan pondok pesantren menjadi elemn pengikat meskipun terkadang belum tentu selaras dengan kepentingan parpol. Tetapi dalam hal ini parpol bernuansa Islam menyadari bahwa aktor mempunyai dukungan yang sangat kuat di tingkat grasstoots, sehingga seakan peran parpol kurang begitu nampak. Bahkan ketika Zani meninggal dan digantikan Dachirin, masa plt.Dachirin hampir satu tahun. Hal ini disebabkan belum ada keselarasan atau titik temu dengan parpol sebagaimana diungkapkan informan 1 sbb.

“ masa plt pak Dachirin cukup lama, hampir satu tahun. Hal ini mengingat bahwa pak Dachirin ini basisnya adalah pondok pesantren dan kurang dengan parpol. Tentunya parpol pengusung menginginkan diisi oleh anggota dewan, namun hal itu kan tidak dapat dipaksakan mengingat antara bupati dan wakilnya kan pasangan; sehingga wacana tersebut gugur. Akhirnya ada dua orang bakal calon wakil bupati yang diajukan yaitu Pak Sekda dan Asisten 1 Pemerintahan Heryanto. Pak Sekda memang berkenan hanya mendampingi, tidak untk dipilih. Dipilih Asisten 1 sebagai wakil bupati karena memang ybs.sudah berpengalaman”.

Jaringan ulama, kyai, dan pondok pesantren menjadi elemen pengikat berbagai macam kepentingan parpol pendukung aktor. Oleh karena itu seakan parpol belum menjalankan

fungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Dalam hal ini jaringan ulama, kyai, dan pondok pesantren menjalankan fungsi sebagai agen yang mampu mengeksplorasi dan mempengaruhi aktor-aktor lain (dalam hal ini parpol) dan merebut dukungan rakyat dalam pilkada. Dalam studi ini, agen utama ini berperan penting dalam proses penerjemahan misi ke rakyat/*grassroots*. Di sinilah terjadi peran aktor dalam jaringan ulama, kyai, dan pondok pesantren sebagai penerjemah untuk menarik suara rakyat serta memobilisasi dan memainkan peran yang mirip dengan pengaruh non-aktor manusia. Non-aktor manusia bisa berbentuk teknologi informasi dan komunikasi, jaringan ulama, kyai, dan pondok pesantren, atau parpol. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Jaringan ulama, Kyai, dan pondok pesantren baik itu berasal dari NU ataupun Muhammadiyah memainkan peran penting dalam memobilisasi dan memberikan makna kepada rakyat untuk mengikuti aksi/dukungan yang diberikan oleh salah satu pemimpinnya. Penerjemahan ini dilakukan dengan menggunakan misi yang sesuai pemahaman tentang agama. Di sisi lain peran ini dipertukarkan untuk mendapatkan fasilitas dan dukungan dari kekuasaan sebagai motif yang tidak dapat disembunyikan.

Teori jaringan aktor pada hakekatnya digunakan untuk memahami jaringan kompleksitas yang rumit, sementara dalam studi ini teori jaringan aktor digunakan untuk mengidentifikasi kompleksitas sosial aktor, dan menggunakannya untuk mendukung keberhasilan seorang aktor dalam pemilihan bupati. Kompleksitas sosial aktor ini tidak membedakan saat ini dari masa lalu, terlihat ataupun tidak terlihat, bermakna ataupun tidak yang semuanya digunakan untuk keberhasilan aktor dalam pemilihan bupati.

Dalam hal ini simbol-simbol masa Orde Baru masih digunakan calon untuk mengakumulasi kekuasaan, yaitu: unsur birokrasi dan pemimpin informal (yaitu ulama dan kyai). Penelusuran lebih lanjut tercatat bahwa aktor menggunakan jaringan pondok pesantren. ada dua Pondok Pesantren besar yang sangat berpengaruh dalam memberikan legitimasi dan berpengaruh di masyarakat Demak, yaitu: Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen yang berdiri pada tahun 1926 di bawah pengaruh NU dengan pengasuh sekarang KH. M. Hanif Muslih dan Pondok Pesantren Girikusumo yang berdiri tahun 1836 dan sekarang di bawah asuhan KH. Munif Muhammad Zuhri yang juga Ketua Majelis Syuro PKB Jawa Tengah. Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen merupakan pondok pesantren terbesar dari 11 pondok pesantren di wilayah Mranggen dengan total santri 5000-an dari 15.000-an santri di wilayah Mranggen. (Sumber: http://fauzanzada.blogspot.sg/2013/02/sejarah-ponpes-utuhiyyah-mranggen-demak_8442.html dan <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/08/13/195729/Suburan-Kampung-Pendidikan-Islam>). Kedua pondok pesantren

tersebut mempunyai banyak cabang di seluruh Demak dan Indonesia, bahkan dapat dikatakan bahwa kedua pondok pesantren ini merupakan cikal bakal pondok pesantren di Kabupaten Demak sehingga legitimasi religius dapat dipastikan sudah dipegang oleh aktor. Dalam budaya masyarakat yang patrimonial, peran pemimpin informal sebagaimana ulama dan kyai sangat berpengaruh dalam mengakumulasi dukungan bagi aktor. Akumulasi dukungan ini dapat disosialisasikan melalui khotbah-khotbah di masjid atau pengajian lainnya. Hal ini dapat ditelusuri bahwa sosialisasi pelaksanaan pilbup oleh KPUD Kab. Demak juga menggunakan sarana masjid untuk tempat pelaksanaan sosialisasi. Mengingat sebagian besar masyarakat melakukan ibadah di masjid maka lebih memudahkan aktor mensosialisasikan gagasan. Jaringan aktor tersebut dapat digambarkan sbb.

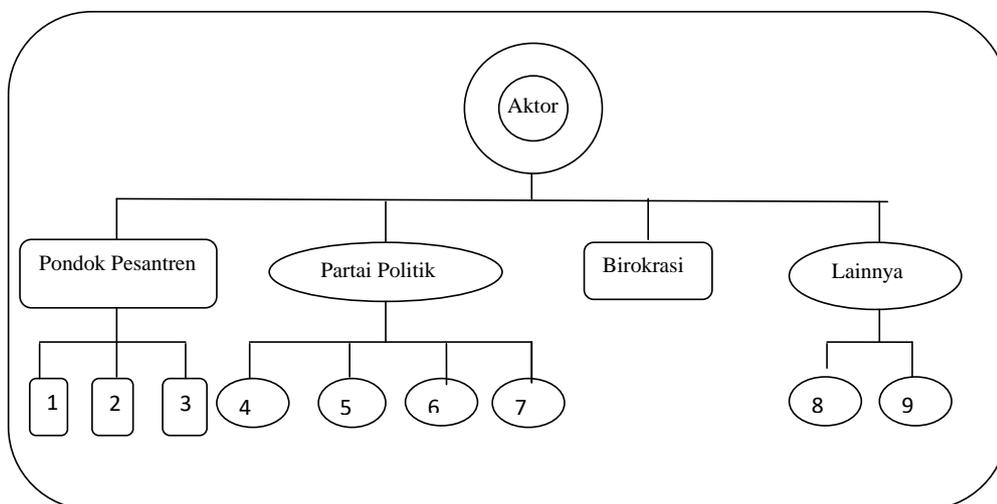


DIAGRAM 4.1. SKEMA JARINGAN AKTOR

Sumber : Diolah dari hasil wawancara dan data sekunder.

Keterangan :

1. PP Futuhiyyah
2. PP Girikusumo
3. PP Lainnya
4. PKB
5. PPP
6. PKS
7. Partai Golkar
8. Perkumpulan Ulama-Umara
9. Lainnya

Identifikasi jaringan aktor tidak terlalu rumit untuk ditelusuri, mengingat masyarakatnya masih sangat sederhana dan budaya patrimonial dalam masyarakat masih sangat kental. Hal ini dapat dilihat bahwa pemimpin informal (ulama dan kyai) masih memegang peran penting dalam mensosialisasikan gagasan-gagasan aktor di ruang publik terbuka seperti masjid. Walaupun terdapat beberapa jaringan yang digunakan aktor, namun jaringan pondok pesantrenlah yang kuat mendukung aktor, meskipun aktor didaftarkan oleh partai politik. Hal ini mengingat adanya *overlapping* peran dan status patron, sebab di satu sisi yang bersangkutan pengasuh pondok pesantren namun di sisi lain juga berperan sebagai ketua majelis syuro partai politik. Kedua pondok pesantren tersebut bukan hanya basis dukungan legitimasi religius bagi calon pemimpin lokal saja, tetapi beberapa tokoh nasional tercatat juga menggunakan legitimasi religius dari kedua pondok pesantren tersebut. Tercatat beberapa tokoh nasional sejak masa Orde Lama (seperti: Idham Khalid, Waperdam, Pangdam, dll), masa Orde Baru (Pangab, Gubernur, Kapolda, dll) sampai masa Reformasi (Kapolda, Pangdam, Menteri, dll) pernah berkunjung ke Pondok Pesantren Futuhiyyah, dan bahkan ketika menjelang pilpres 2014 Jokowi dan JK pernah berkunjung ke Pondok Pesantren Girikusumo. (Sumber: http://fauzanzada.blogspot.sg/2013/02/sejarah-ponpes-futuhiyyah-mranggen-demak_8442.html dan <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/26/jk-sowan-ke-pondok-pesantren-girikusumo-demak>). Dualisme peran ulama dan kyai ini semakin memperkuat dan memudahkan aktor memperoleh dukungan masyarakat.

3. AKTOR MANUSIA DAN NON MANUSIA

Aktor dapat berbentuk manusia ataupun non manusia. Sistem informasi merupakan salah satu non-aktor manusia yang digunakan untuk menerjemahkan misi aktor. Sistem informasi yang digunakan di kalangan ulama, kyai, dan pondok pesantren baik dalam bentuk majelis taklim, organisasi ulama, kyai, dan pondok pesantren menunjukkan fungsinya yang dapat mempengaruhi dukungan rakyat pada aktor. Hal ini dipertegas oleh informan 2 sbb.

“Bagaimanapun juga kegiatan atau aktivitas pengajian dan pertemuan-pertemuan ulama yang dihadirinya menunjukkan adanya dukungan ulama. Apalagi sumbangan yang pernah diberikannya pada pesantren, tentu menjadi ikatan batin untuk memberikan dukungan. Ke masyarakat, para ulama atau kyai ini menyampaikan misi calon agar didukung”.

Aktor bersedia bergabung manakala kepentingan yang diterjemahkan dalam misi aktor adalah sama. Kesamaan kepentingan, dalam hal ini fasilitas yang pernah diberikan kepada jaringan baik dalam bentuk sarana dan prasarana fisik yaitu perbaikan fasilitas pesantren ataupun

peningkatan kualitas ulama, kyai, dan para santri. Aktor manusia dalam jaringan bertugas sebagai perantara dari misi aktor. Peran perantara ini berbeda dengan mediator, sebab sebagai perantara maka aktor mengidentifikasi diri sederajat dengan aktan yang mungkin kelas sosialnya sama. Perantara tidak membuat perbedaan dengan entitasnya, sehingga berbeda dengan peran mediator yang seringkali justru melahirkan perbedaan. Jaringan dengan perantara para ulama, kyai dan pondok pesantren ini mudah diterima masyarakat mengingat ciri masyarakatnya yang homogen dan unsur religius masih dijunjung tinggi. Sedangkan aktor non manusia dapat berbentuk organisasi, wadah dari aktor.

Dalam banyak kasus umumnya aktor berpengaruh dominan terhadap jaringan, namun dalam penelitian ini justru sebaliknya. Aktor bupati menguasai dahulu jaringan ulama, kyai, dan pondok pesantren; sehingga pesan dari aktor kemudian disosialisasikan kepada rakyat. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan 2 dan 3 sbb.

“di sini, bila ulama, kyai, dan pondok bersatu dan sudah satu suara; maka dukungan masyarakat akan lebih mudah diarahkan. Pak Zani dan pak Dachirin ini kan akrab dan dekat dengan lingkungan ini, jadi sangat mudah mereka masuk. Ibaratnya balas budi, sebab siapa yang nggak kenal pak Dachirin. Hampir semua pondok kenal, sebab beliau kan instruktur di Depag Semarang yang sering memberikan pelatihan, apalagi beliau orang asli Demak”.

Tidak semua masyarakat memang berkaitan langsung dengan jaringan ulama, kyai, dan pondok pesantren. Masyarakat yang tidak terhubung dengan jaringan ini, disatukan dengan aktor melalui faktor kedekatan hubungan dan budaya terzalimi yang dialami oleh Zani. Penelitian ini menemukan ternyata dalam teori jaringan aktor, faktor budaya turut mempengaruhi sebuah keberhasilan atau kegagalan seorang aktor. Teori jaringan aktor adalah bahan realasional, bahan memperpanjang semiotik yang berasumsi bahwa semua entitas mencapai makna dalam kaitannya dengan orang lain; dalam hal peran agen sangat penting. Agen dalam hal ini diperankan oleh jaringan ulama, kyai, dan pondok pesantren yang berfungsi juga sebagai perantara.

Aktor non manusia lainnya yang juga penting adalah partai politik. Sebab bagaimanapun juga partai politik sangat berperan dalam menyalurkan suara masyarakat. Dukungan partai-partai Islam (PKB, PPP, dan PKS) dan partai nasionalis (Partai Golkar) memperkuat aktor. Dalam penelitian ini justru parpol yang menghubungi jaringan untuk kemudian mengusul calon bupati.

4. TRANSLATIONS DAN TOKENS

Selama masa jabatan pertama Zani, dapat dikatakan tidak ada masalah atau problem besar; meskipun memang banyak sekali program-program bupati sebelumnya tidak dilanjutkan. Hal ini menurut Informan 2 lebih disebabkan karena keterbatasan APBD. Selama periode pertama Zani, memang perhatian ke pesantren sangat besar dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana santri; bahkan pada awal periode kedua bersama Dachirin memberdayakan SDM pesantren dalam bentuk diklat-diklat singkat. Dukungan timbal balik ini sifatnya sukarela, mengingat terjadi ‘transaksi’ yang tidak begitu disadari oleh jaringan sebab keduanya sebenarnya juga saling membutuhkan. Dengan demikian yang berfungsi sebagai *translation* (penterjemah) utama adalah jaringan ulama, kyai, dan pondok pesantren; sedangkan partai politik kurang begitu berperan meskipun aktor membutuhkan sebagai ‘kendaraan’ politik. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban ketika Zani meninggal, maka plt.Dachirin berlangsung hampir 1 tahun.

Callon menyatakan bahwa dalam *translations*, inovator berupaya menciptakan sebuah forum sebagai jaringan sentral dengan persetujuan semua aktor untuk membangun dan mempertahankan jaringan sentral. Penelitian ini justru menunjukkan sebaliknya, aktor tidak menciptakan forum sebagai jaringan sentral; tetapi memanfaatkan jaringan yang sudah kuat dan mengakar untuk membangun dan mempertahankan aktor.

Token atau objek semu yang dilalui aktor dalam jaringan menurut Callon sangat mempengaruhi keberhasilan aktor. Artinya semakin melewati jaringan, maka menjadi semakin *punctualized* (tepat waktu) dan semakin dipertimbangkan. Keadaan non job atau penyingkiran Zani sebagai Sekda pada tahun ke-3 kepemimpinan bupati Endang dan pemberitaan media massa yang gencar serta tepat waktu mengingat membuat dukungan masyarakat pada Zani sangat tinggi. Ketepatan waktu dan issue ‘dizalimi’ yang terjadi ini juga menjadi faktor penarik rakyat untuk memberikan dukungan.

C. DAMPAK JARINGAN AKTOR

Dampak faktual jaringan, Zani terpilih menjadi bupati selama dua kali periode. Kekuatan ini memberi banyak akses ke wilayah kabupaten Demak untuk mengelola pemerintahan dan memperkuat jaringan. Kuatnya dukungan jaringan ulama dalam NU dan Muhammadiyah ini bahkan mampu menggalang dukungan parpol. Dalam kehidupan sehari-hari jaringan ulama ini memperkuat kestabilan politik yang terjadi di legislatif daerah maupun eksekutif, sehingga konflik politik yang terjadi di tingkat pusat/nasional tidak berimbas ke legislatif daerah Kab. Demak. Hal ini sebagaimana diungkapkan informan 1 dan

informan ke-4 bahwa konflik yang terjadi di DPR antara KMP dan KIH dan berimbas pada keterbelahan antara KMP dan KIH di DPRD Propinsi Jawa Tengah, tetapi hal tersebut tidak berdampak pada DPRD Kab. Demak. Hal ini menunjukkan bila konflik yang terjadi di tingkat legislatif pusat karena keterbelahan koalisi, belum tentu berimbas di tingkat lokal. Faktor yang menentukan itu adalah adanya pengaruh ulama yang kuat dalam kehidupan pemerintahan. Bahkan dukungan ulama lah yang justru memperkuat parpol, bukan sebaliknya.

Kehadiran aktor pada kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh ulama, kyai, pondok pesantren baik dari kalangan NU dan Muhammadiyah selain membangun kedekatan dengan rakyat, juga mensosialisasikan misi aktor untuk merebut dukungan rakyat. Dampak yang ditimbulkan adalah terbangunnya komunikasi yang baik antara kalangan ulama, kyai, dan pondok pesantren dengan aktor yang nantinya berguna untuk memperkuat basis dukungan pemerintahan dengan DPRD Kab. Demak. Sebab kalangan tersebut menjadi mudah untuk digerakkan aktor bila terjadi hubungan ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif daerah. Namun nampaknya hubungan ketidakharmonisan tersebut tidak pernah terjadi di Kab. Demak, basis dukungan parpol Islam dengan kalangan ini sangat dekat; bahkan sulit untuk dipisahkan meskipun tidak terlihat oleh mata.

Jalinan komunikasi yang baik dalam Komunikasi Ulama-Umara di tingkat kabupaten selama 4 kali per tahun, salah satu dampaknya adalah adanya dukungan rakyat dalam implementasi kebijakan. Namun demikian tidak berarti semua kebijakan sangat mudah diimplementasikan, sebab terkait dengan kebijakan yang mengubah *mindset* dan budaya masyarakat seperti: MCK masih sangat sulit diterapkan terutama bagi kalangan tua (50 tahun ke atas); walaupun untuk kebijakan lainnya masyarakat mudah digerakkan oleh pemerintah. Dampak lainnya adalah tidak adanya benturan antara pemerintah, legislatif, ataupun rakyat yang mengakibatkan konflik berkepanjangan. Hal ini tidak berarti menjadikan kabupaten ini maju pesat, namun bila dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya (tahun 2004) maka kabupaten Demak sekarang lebih tertata baik secara fisik ataupun SDM-nya. Bila dahulu, masyarakat hanya mengenal sekolah pada pondok-pondok pesantren dengan sarana dan prasarana yang terbatas, sekarang fasilitasnya lebih baik dan heterogenitas jenis pendidikan. Melalui pengajian-pengajian maka para ulama dan kyai ini memanfaatkannya juga untuk mensosialisasikan program pemerintah. Penyelidikan lebih jauh menemukan bahwa dukungan pemerintah dalam memfasilitasi SDM pesantren dan perbaikan sarana serta prasarana pesantren yang lebih baik menunjukkan bahwa aktor sangat memperhatikan jaringan ini, sehingga jaringan inilah yang mempengaruhi parpol. Oleh karena itu ketika

plt.Dachirin hampir satu tahun, maka jaringan ulama, kyai, dan pesantren inilah yang berfungsi sebagai agen dalam partai politik. Hal ini diperkuat oleh informan 1 sbb.

“ Pak Dachirin menjalin komunikasi bagus dengan semua parpol. Ketika plt,yang bersangkutan lama, maka ybs juga tidak kasak-kusuk dengan parpol; karena toh akhirnya ke beliau juga. Mungkin karena faktor wakilnya yang belum ada”.

Lambatnya dukungan DPRD kepada Dachirin semata-mata karena prosedur, tetapi bila ditelusuri lebih jauh adalah karena kekhawatiran parpol tidak mendapat dukungan para ulama, kyai, dan pondok pesantren bila tidak segera mengangkat Dachirin menjadi bupati dan memilihkan wakil bupati yang dipaksakan.

D. DAMPAK KONTEMPORER JARINGAN

Jaringan pada masa kontemporer adalah jaringan yang menyatu antara ulama, kyai, dan pondok pesantren tanpa membedakan NU ataupun Muhammadiyah yang menjadi akar parpol Islam yaitu PKB, PPP, dan PKS sangat berperan dalam menjaga kestabilan politik legislatif ataupun pemerintahan. Kuatnya dukungan jaringan ulama ini mempengaruhi parpol Islam, sehingga konflik politik yang terjadi pada lembaga legislatif pusat/nasional dan propinsi, tidak mampu *menggoyang* stabilitas politik lokal yang sudah ada. Jaringan mensosialisasikan misi aktor dalam komunitasnya, sedangkan aktor memberikan berbagai fasilitas yang sangat mendukung fungsi jaringan tersebut. Perhatian aktor terhadap jaringan sangat besar, bahkan cenderung percaya pada jaringan dalam melakukan pengawasan. Komunikasi timbal balik yang lancar dan langsung antara aktor jaringan, menjadikan jaringan tersebut kuat bahkan dapat mempengaruhi parpol. Dampak yang lebih lanjut adalah peran parpol menjadi kecil, dan hanya sebagai alat/kendaraan politik seorang aktor ketika seseorang mencalonkan bupati dalam pilkada. Penelitian ini hanya mampu mengungkapkan dampak jaringan tersebut, dan belum dapat menjelaskan seberapa besar fasilitas yang diberikan aktor.

Eforia politik yang seringkali berakhir dengan konflik, ternyata tidak terjadi di Kab. Demak. Peran ulama, kyai, dan pondok pesantren yang kuat dan menyatu serta komunikasi yang bagus antara ulama-umara menjadikan jaringan aktor di Kab. Demak, bersifat mutlak dan konstan. Hal ini bertolak belakang dengan teori Latour yang menyatakan bahwa jaringan tidak bersifat group/kelompok, hanya pembentukan kelompok dalam jaringan dimana asosiasi antara kelompok adalah tidak jelas, rapuh, kontroversial, dan mengubah proses yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa yang terjadi di Kab. Demak sebaliknya,

jaringan bersifat kelompok dan asosiasi antar kelompok sangat jelas, kuat, selaras dan memperlancar proses yang berkelanjutan, bahkan mampu mempengaruhi parpol.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesatuan sistem sosial dalam masyarakat Demak untuk mempertahankan keseimbangan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Terkait dengan hal ini sistem sosial-sistem sosial yang terdapat dalam masyarakat yang terkait dengan jaringan tersebut bersifat saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain, di mana perubahan pada salah satu sistem maka akan mempengaruhi sistem yang lainnya juga. Dalam hal ini bila sistem sosial (jaringan) pada masyarakat yang memberikan tempat utama bagi ulama, kyai pada pondok pondok pesantren kuat maka peran sistem sosial (jaringan) lainnya seperti birokrasi dan jaringan lainnya akan lemah. Lemahnya jaringan birokrasi ini memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang netralitas birokrasi; sehingga dalam sistem sosial (jaringan) yang kuat adalah pondok pesantren, parpol, dan lainnya. Sedangkan birokrasi dalam jaringan ini yang dimaksud adalah kedekatan aktor secara pribadi/individu yang telah terbina sejak aktor meniti karir dalam birokrasi. Fenomena ini sesuai dengan perspektif struktural fungsional Talcot Parson yang mengabaikan kemungkinan adanya konflik sebab konflik dianggap hanya akan mengganggu stabilitas masyarakat (Parson, 1986).

Dengan demikian aktor dalam memperoleh dan memperkuat kekuasaannya menggunakan pengaruh pemimpin informal yang kemudian dilegalkan melalui struktur politik modern yaitu dukungan partai politik. Dalam faktanya aktor jaringan yang berperan penting dalam pondok pesantren dan parpol yang berpengaruh di Kab. Demak (yaitu PKB, PPP, dan PKS) berasal dari kalangan yang sama yaitu pondok pesantren. Artinya ada sinergi antara legitimasi religius yaitu pengakuan dari tokoh agama, legitimasi sosiologis yaitu kesepakatan dan dukungan dari masyarakat, legitimasi etis karena tidak melahirkan konflik, serta legitimasi hukum sebagai pendukungnya.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasar hasil penelitian maka dapat disimpulkan sbb.

1. Jaringan aktor yang terbentuk selama pilkada di Kab. Demak lebih dipengaruhi oleh faktor budaya terzalimi oleh bupati sebelumnya bertepatan dengan waktu pilkada (*punctualized*). Faktor budaya ini mampu menarik empati masyarakat dan mengantar aktor memenangi pilkada. Pada pilkada kedua, aktor memanfaatkan jaringan ulama, kyai, dan pondok pesantren mengingat jaringan ini mempunyai akar yang kuat di masyarakat. Dukungan ini ditukar dengan pemberian fasilitas ke jaringan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM jaringan. Jaringan aktor menghasilkan kesatuan misi yang sama dengan aktor, untuk selanjutnya jaringan berfungsi sebagai agen atau perantara dalam mensosialisasikan misi aktor. Perantara ini merupakan entitas yang tidak membuat perbedaan dengan berbagai kelas sosial, kelompok, atau kekuasaan, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Stabilitasnya kondisi politik di Demak, tidak berarti kesejahteraan rakyat menjadi baik; tetapi bila dibandingkan masa 10 tahun yang lalu maka kesejahteraan rakyat sekarang lebih baik. Jejaring aktor kuat sehingga mampu menarik dukungan parpol, bahkan tidak terpengaruh oleh peta politik legislatif di tingkat nasional.
2. Jaringan aktor yang dibangun melalui pondok pesantren menunjukkan keseimbangan yang baik antara struktur dan fungsi, sehingga tidak melahirkan konflik dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya patrimonial, peran pondok pesantren dengan tokoh ulama dan kyai masih memegang peran penting dalam menentukan kesuksesan aktor membentuk jaringan. Pada masyarakat yang belum maju dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti di Kab. Demak ini, pertemuan-pertemuan secara langsung memegang peran penting dalam sosialisasi. Hal ini memperkuat teori struktural fungsional dari Parson yang menyatakan adanya keterhubungan antar sistem sosial, di mana perubahan salah satu sistem maka akan berpengaruh pada sistem lainnya. Artinya kuatnya sistem sosial pada jaringan pondok pesantren dan parpol, diikuti lemahnya pengaruh birokrasi dan sistem lainnya. Hal ini menunjukkan kuatnya dukungan legalitas religius dalam struktur politik modern sebagai

dasar untuk memenangkan kekuasaan. Legalitas religius ini sebagai dasar untuk memenangkan legalitas hukum kekuasaan.

B. SARAN

1. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh faktor budaya (terzalimi atau teraniaya misalnya) sebagai salah satu indikator pada terbentuknya jaringan aktor.
2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, memungkinkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pengganti pertemuan tatap muka berperan penting dalam jaringan, sehingga pendalaman tentang *translation* dan *token* dalam masyarakat yang sudah maju perlu masukkan unsur teknologi informasi dan komunikasi terkini.
3. Perlu penelitian lebih lanjut tentang pengaruh kepemimpinan informal dan faktor budaya terhadap jaringan aktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusyanto, Ruddy. (2007). *Jaringan Sosial Dalam Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo
- BPS Kab. Demak. *Demak Dalam Angka 2012* diakses pada demakkab.go.id pada 15 November 2014.
- Chalid, P. (2005). *Pilkada Langsung*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Politik.
- Callon, Michel; Latour, Bruno, dan Law, John *dalam Actor-Network Theory* diakses pada http://en.wikipedia.org/wiki/Actor%E2%80%93Network_Theory tanggal 20 Januari 2014.
- Guba, E.G. & Lincoln, S.Y. (1985). *Naturalistic Inquiry*. USA: Sage Publication.
- Latour, Bruno. (2005). *Reassembling the Social, An Introduction to Actor-Network-Theory*. New York : Oxford University Press.
- Parson, Talcot. (1986). *Esei-Esei Sosiologi*. Terjemahan Drs. SHS. Jakarta: Aksara Persada Press.
- Pesantren Futuhiyyah diakses pada http://fauzanzada.blogspot.sg/2013/02/sejarah-ponpes-futuhiyyah-mranggen-demak_8442.html tanggal 1 Desember 2014.
- Pesantren Girikusumo diakses pada <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/26/jk-sowan-ke-pondok-pesantren-girikusumo-demak> tanggal 4 Desember 2014.
- Riyanto. (2013). *The Construction of Actor-Network: A Study on the Local Election Conflicts in the Perspective of Actor-Network Theory in Banyuwangi Regency*. *Journal of Basic And Applied Scientific Research* 3 (8) 599-603, 2013 diakses pada <http://www.textroad.com/pdf/JBASR/J.%20Basic.%20Appl.%20Sci.%20Res.,%203%288%295-99-603,%202013.pdf> tanggal 24 Mei 2013.
- Smith, B.C.(1985). *Field Administration an Aspect of Decentralization*. Chicago: Rand Mc Nally.
- Zuhro, R. Siti. *Memahami Demokrasi Lokal : Pilkada, Tantangan dan Prospeknya*. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*.
http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2012_12_07_11_54_01_Jurnal%20Pemilu%20&%20Demokrasi%2004.pdf diakses tanggal 20 Februari 2014.
- Hasil Pileg 2009 Kab.Demak diakses pada <http://kpudemak.wordpress.com/> tanggal 30 Januari 2013.

Lampiran 1 : JUSTIFIKASI ANGGARAN

1. Anggaran untuk pelaksanaan, anggaran ini diajukan untuk keperluan berikut :

- Upah untuk tim peneliti dalam pembuatan proposal penelitian dan perbaikan proposal penelitian;
- Upah untuk tim peneliti dalam penyusunan laporan dan finalisasi hasil penelitian.

2. Anggaran untuk peralatan dan bahan habis pakai yang diajukan untuk keperluan sebagai berikut:

- Pembelian alat utama penelitian yaitu USB, kertas HVS, batu baterai, bolpoint, cartridge, pensil, binder clip, pensil.
- Pembelian bahan penunjang penelitian yaitu penggandaan dokumen tertulis/referensi, souvenir untuk informan, dan konsumsi.

3. Anggaran untuk perjalanan

- Anggaran ini diajukan untuk transportasi Jakarta ke Semarang, Semarang ke Demak, dan transport lokal di Demak untuk melakukan wawancara dengan para informan;
- Anggaran untuk perhari para peneliti di lapangan.

4. Anggaran untuk belanja barang non operasional.

- Anggaran ini diajukan untuk surat-menyurat, telepon, faks, perijinan, pengiriman berkas-berkas penelitian pada instansi terkait, rapat, diskusi, presentasi di depan subyek penelitian, dan urusan-urusan administrasi lain termasuk ijin penelitian serta berbagai pertemuan dan diskusi dengan para informan.
- Penginapan para peneliti di lapangan.
- Honorarium informan.

Lampiran 2 DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA

Beberapa sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Komputer yang online dengan internet (disediakan oleh Universitas Terbuka/UT)
2. Perpustakaan untuk mengumpulkan referensi/literature pendukung.
3. Ruang rapat untuk kegiatan koordinasi.
4. ATK dan seminar kit yang diperlukan pada waktu seminar disediakan oleh UT

Lampiran 3

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI

NO	NAMA/NIDN	INSTITUSI ASAL	BIDANG ILMU	ALOKASI WAKTU	TUGAS
1	Susanti, Dra. M.Si/ 0014126704	Universitas Terbuka	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	2jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir kegiatan perencanaan penelitian • Mengkoordinir kegiatan pelaksanaan penelitian • Mengkoordinir kegiatan evaluasi • Mengkoordinir finalisasi laporan penelitian
2	Mani Festati Broto, Dra, M Ed/ 0023026002	Universitas Terbuka	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	2jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan perencanaan penelitian • Melaksanakan kegiatan pelaksanaan penelitian • Melaksanakan kegiatan evaluasi • Melaksanakan finalisasi laporan penelitian
3	Setyo Kuncoro,S.S.,M.A./ 0014127105	Universitas Terbuka	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	2jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan perencanaan penelitian • Melaksanakan kegiatan pelaksanaan penelitian • Melaksanakan kegiatan evaluasi • Melaksanakan finalisasi laporan penelitian

Lampiran 4

BIODATA KETUA TIM PENELITI**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dra. Susanti, M.Si.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP	19671214 199303 2 002
5	NIDN	0014126704
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 14 Desember 1967
7	E-mail	susanti@ut.ac.id
8	Nomor Telepon/Faks	021-74909941 ext.1927 / 021-7434391
9	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 ≥ 1000 orang
10	Mata Kuliah yang Diampu	1. Sistem Politik Indonesia
		1. Teori Politik
		2. Metodologi Ilmu Pemerintahan
		3. Manajemen Konflik

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro	Universitas Indonesia	-
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Ilmu Politik	
Tahun Masuk-Lulus	1986-1991	2000-2003	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Implementasi Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tentang Penghapusan Becak	Konflik Politik tentang Pilkada Banjarnegara 2000- 2005	
Nama Pembimbing/Promotor	Prof.Drs. Abdul Kahar Badjuri	Prof.Dr. Maswadi Rauf,M.A.	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2012	Meningkatkan Partisipasi Tutorial <i>Online</i> Bagi Mahasiswa Pasif Program Pascasarjana Universitas Terbuka melalui <i>sms reminder</i>	UT	30.000.000
2.	2010	Kajian Kesesuaian Substansi BMP MAPU 5103 Metodologi Penelitian Administrasi dengan Kompetensi Administrasi Publik	UT	30.000.000
3.	2009	Kajian Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat di Desa Jabon Mekar, Parung - Kabupaten Bogor	UT	30.000.000
4.	2009	Pemetaan Substansi TAPM berdasarkan Bidang Keilmuan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka (Studi Kasus pada Program MAP)	UT	30.000.000
5.	2008	Pola Pikir Mahasiswa dalam Menerapkan Konsep dan Teori Matakuliah MAPU 5102 Teori dan Isu Pembangunan untuk Menganalisa Permasalahan Administrasi Publik	UT	30.000.000

- Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	Pelatihan Administrasi Keuangan Daerah bagi Aparat Desa Pondok Cabe Udik Kota Tangsel	UT	
2.	2012	Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa bagi Aparat Desa di Desa Jonggol, Kab. Bogor	UT	
3.	2011	Monitoring Bansos Pengelolaan Sampah UT ke Pemda Tangsel	UT	

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
4.	2011	Monitoring Penghijauan UT di Situ Gintung	UT	
5.	2010	Pelatihan Komunikasi Efektif di Kab. Cilegon	UT	
3.	2008	Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula	SMAN 1 Sukaresmi Kab. Cianjur	

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Waktu dan Tempat
	-		

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul	Penyelenggara
1	2012	Anatomi Konflik di Indonesia	Semnas FISIP UT
2	2012	Kendala Radikalisme dalam Mewujudkan <i>Civil Society</i> di Indonesia	Semnas FISIP UT
3	2012	Kajian Partisipasi Peran Badan Perwakilan Desa dalam Pengambilan Keputusan	IAPA - Unbraw
4	2011	Pergeseran Pola Pikir Seorang Birokrat menjadi Akademisi: Sebuah Analisis Isi TAPM Program Magister Administrasi Publik UT	PPs UT
5.	2011	Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Tutorial Online Mahasiswa MAP PPs-UT	ICDE Annual Conference
6	2008	Kontribusi Pendidikan Jarak Jauh dalam Meningkatkan Kualitas <i>Gender</i> pada Program Pascasarjana UT	Seminar Nasional PJJ-APPJI

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
	-			

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
	-			

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
	-			

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Judul Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satyalencana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI	2006

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumlah ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Fundamental.

Tangsel, 31 Mei 2013

Pengusul

(Dra. Susanti,M.Si).

BIODATA ANGGOTA TIM PENELITIAN

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dra. Mani Festati Broto, M Ed
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP	19600223 198603 2 001
5	NIDN	00230260002
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Banjarmasin, 23 Februari 1960
7	E-mail	mani@ut.ac.id
8	Nomor Telepon/Faks	021-7490941/021-7434391
9	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 ≥ 1000 orang
10	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Ilmu Politik
		1. Sistem Kepartaian dan Pemilu
		2. Kekuatan Sosial Politik Indonesia
		3. Komunikasi Politik

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	Simon Fraser University, Vancouver, Canada	-
Bidang Ilmu	Ilmu Politik	Distance Education Manajement	
Tahun Masuk-Lulus	1978-1985	1986-1988	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Faktor2 Eksternal yang mempengaruhi isolasi sosialisme Burma	<i>Peer Interaction: Case study UT's student</i>	
Nama Pembimbing/Promotor	<ul style="list-style-type: none"> • Prof Dr Burhan Magenda • Prof.Dr. Maswadi Rauf,M.A. 	Thomas O'Shea, Ph D	

K. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2009	Pengembangan Model Pembelajaran Melek Media Televisi, Laporan Hasil Penelitian Hibah Penelitian Strategis Nasional	UT	100.000.000
2.	2008	Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR): Studi tentang filantropi pada Perusahaan Media Massa	UT	30.000.000

- Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber

L. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	Manajemen Dokumentasi Pemerintahan Desa, Desa Pondok Cabe Ilir	UT	
2.	2011	Penghijauan di Situ Gitung dan monitoring bantuan sosial pengolahan sampah	UT	
3.	2010	Pengembangan Model Pembelajaran Melek Media TV pada anak2 Sekolah Dasar di SD Babakan, Ciputat	UT	

M. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Waktu dan Tempat
1	Open and Distance Higher Education and Rights Of The Diffable	Jurnal PTJJ, Volume 10, No.2	Tangerang Selatan, September 2009

N. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul	Penyelenggara
1.	2011	<i>Distance Education Accelerates The Construction of Civil Society,</i>	Poster pada 24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011
2.	2011	<i>ASEAN Community</i>	24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt
3.	2010	<i>Citizen Journalism: Jejaringan Sosial untuk penguatan Civil Society,</i>	Seminar Nasional FISIP tentang <i>Citizen Journalism</i> dan Keterbukaan Informasi Publik untuk Semua, Pondok Cabe, 11 November 2010.
4.	2010	<i>Enhancing Distance Education Student's Interaction through Online Learning,</i>	Seminar on Integrating Technology Into Education, Jakarta, 17-18 May 2010.

O. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-				

P. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
	-			

Q. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
	-			

R. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Judul Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satyalencana Karya Satya 20 Tahun	Presiden RI	2006

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Fundamental.

Tangsel, 31 Mei 2013

Pengusul,

(Dra. Mani Festati Broto, M.Ed.)

BIODATA ANGGOTA TIM PENELITIAN

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Setyo Kuncoro, SS,M.A
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP	197112141999031001
5	NIDN	0014127105
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang,14 Desember 1971
7	E-mail	kuncoro@ut.ac.id
8	Nomor Telepon/Faks	021-7490941/021-74
9	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 ≥ 1000 orang
10	Mata Kuliah yang Diampu	1. Asas-Asas Manajemen
		1. Sistem Ekonomi Indonesia
		2. Arsip Bisnis
		3. Manajemen Keuangan Publik

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Jember	University Indonesia	-
Bidang Ilmu	Bahasa dan Sastra	Ilmu Administrasi	
Tahun Masuk-Lulus	1992-1998	2008-2011	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	The Glory of Russian Peasants as the background of "The Cherry Orchard"	Analisis Kualitas proses belajar di Universitas Terbuka (Studi Kasus terhadap mahasiswa S1 FISIP-UT Jakarta)	
Nama Pembimbing/Promotor	<ul style="list-style-type: none"> • Prof Gunawan Hupoyo • Wisasanko,SS,MA 	Dr. Amy S Rahayu M.Si	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2008	Analisis Propektif terhadap kebijakan Pembentukan Program Diploma IV kepegawaian	BKN -UT	20.000.000
2.	2012	Analisis Persepsi Mahasiswa UT Terhadap layanan Pembelajaran Jarak Jauh di Universitas Terbuka (Studi Kasus Mahasiswa FISIP UT-UPBJJ Kupang dan Malang)	UT	20.000.000

- Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lain

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	Bentuk	Tempat	Waktu
1	Pengelolaan Keuangan keluarga	Pelatihan	Kecamatan Cipanas Cianjur	1-2 Juli 2011
2	Pengelolaan asministrasi keuangan desa	Pelatihan	Kecamatan Pamulang tangerang Selatan	4 Oktober 2012

E.Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Waktu dan Tempat
-			

F.Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

NO	Judul seminar	Tahun	Penyelenggara
1	<i>International Conference on Small and Medium Enterprise Development dengan tema : Innovation and Sustainability in SME Development The Custom Made Strategy of "Satu Kayu Desain Enterprise" in Efforting to Achieve Sustainable Competitive Advantage.</i> (makalah bersama dengan Drs.Agus Priyanto,M.Si)	2012	Universiats Parahyangan Bandung - STIE Sriaatma Mulya Denpasar

G.Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-				

H.Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
	-			

I.Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
	-			

J.Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Judul Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
	-		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Fundamental.

Tangsel, 31 Mei 2013

Pengusul,

(Setyo Kuncoro, SS,M.A.)

Lampiran 5 Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telepon: 021-7490941 (Hunting)
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Susanti, M.Si.
NIDN : 0014126704
Pangkat / Golongan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:
**KAJIAN ACTOR NETWORKING THEORY PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN DEMAK** yang diusulkan dalam skema Penelitian Fundamental
untuk tahun anggaran 2014 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh
lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian,



(Dr. Dewi A. Padmo Putri, M.A., Ph.D.)
NIP. 19610724 198710 2 001

Tangerang Selatan, 30 Mei 2013

Yang Menyatakan,



(Dra. Susanti, M.Si.)
NIP. 19671214 199303 2 002

Lampiran 6. Anggaran Biaya

Adapun Rincian biaya penelitian sbb.

A	PELAKSANAAN	JUMLAH BIAYA
	Gaji/Upah	
1.	Pembuatan proposal penelitian 3orang x3 hari x Rp 30.000	Rp 2.700.000,-
2.	Perbaikan proposal penelitian 3orang x2 hari x Rp 30.000	Rp 1.800.000,-
3.	Penyusunan laporan penelitian 3orang x3 hari x Rp 30.000	Rp 2.700.000,-
4.	Finalisasi laporan penelitian 3orang x2 hari x Rp 30.000	Rp 1.800.000,-
	Subtotal	Rp 9.000.000,-
B	BAHAN HABIS PAKAI	
1.	3 (tiga) USB/Flash Disk 16 GB	Rp. 450.000,-
2.	Kertas HVS SD 80 gr (10 rim) @ Rp 35.000	Rp. 350.000,-
3.	Bolpoint pentel (10 buah)	Rp. 425.000,-
4.	Catridge HP LaserJet Pro 440 (1 buah @ Rp550.000)	Rp. 550.000,-
5.	Batu baterai alkalin A-3 (6 set) @ Rp 12.200	Rp. 73.200,-
6.	Binder clips no. 155 2 dozn @ Rp 8.200	Rp. 16.400,-
7.	Souvenir (10 orang) @ Rp 30.000	Rp. 300.000,-
8.	Fotokopi dokumen tertulis/references	Rp 335.400,-
9.	Konsumsi	
	• Snack @ Rp 10.000,- (10 orang/12 kegiatan)	Rp. 1.200.000,-
	• Makan siang @ Rp. 30.000,- (10 orang/6 kegiatan)	Rp. 1.800.000,-
	Subtotal	Rp 5.500.000,-
C.	BELANJA PERJALANAN	
1.	Transportasi	
	Jakarta – Semarang	
	3 orang x 2 (PP) X Rp.1.000.000,-	Rp 6.000.000,-
	Semarang – Kab. Demak : 3 peneliti x 2 (PP) X Rp. 100.000	Rp. 600.000,-
	Transport Lokal Demak : 3 Peneliti x Rp. 100.000	Rp. 300.000,-
2.	Perhari	
	3 peneliti x 3 hari X Rp 300.000,-	Rp 2.700.000,-
	Subtotal	Rp 9.600.000,-
D	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	
1.	Sosialisasi, Publikasi, dan Pengurusan Ijin (Honorarium 3 org x 2 kegiatan x Rp. 300.000,-)	Rp. 1.800.000,-
2.	Penginapan : 3 peneliti X 2 hari X Rp.350.000,-	Rp. 2.100.000,-
3.	Honorarium Informan 10 orang X Rp 200.000,-	Rp 2.000.000,-
	Subtotal	Rp 5.900.000,-
	TOTAL	Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Formatted: Strikethrough

Lampiran 7. Jadwal Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan dalam penelitian ini adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak proposal penelitian ini disetujui. Adapun rincian kegiatannya sbb.

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan (Tahun 2014) ke-								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penyusunan Proposal	■								
2.	Perbaikan Proposal	■								
3.	Penyusunan Pedoman Wawancara		■							
4.	Uji coba Pedoman Wawancara		■							
5.	Perbaikan Pedoman Wawancara		■							
6.	Pelaksanaan Penelitian			■	■	■				
	Wawancara			■	■	■				
	Studi literatur						■	■	■	
7.	Pengolahan data						■	■	■	
8.	Analisis data						■	■	■	
9.	Penyusunan <i>draft</i> laporan						■	■	■	
10.	Seminar hasil								■	
11.	Finalisasi laporan								■	
12.	Penulisan artikel ilmiah									■

Lampiran 8. Panduan Wawancara
KAJIAN *ACTOR-NETWORK THEORY* PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN DEMAK

Pengantar Wawancara

Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr. berikan ini tidak ada yang benar atau salah, karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Jejaring Aktor Pilkada di Kab. Demak.

Pertanyaan :

1. Bagaimana hubungan relasional dalam jaringan?
2. Bagaimana aktivitas bersama dilakukan?
3. Bagaimana kebiasaan dan prosedur dipertahankan?
4. Bagaimana asal jaringan terbentuk dan bertindak?
5. Mengapa jaringan harus dibentuk?
6. Bagaimana kelompok aktor yang terlibat menciptakan makna? (material dan semiotik)
7. Bagaimana hubungan unsur-unsur yang berbeda bersama-sama menuju jaringan?
8. Bagaimana intensitas hubungan sosial dilakukan?
9. Mengapa seseorang bersedia bergabung dalam jaringan?
10. Bagaimana aktor manusia berperan?
11. Bagaimana aktor non-manusia berperan?
12. Bagaimana aktor menyampaikan masukan? (tetap atau dengan penambahan-penambahan)
13. Bagaimana peran aktor dalam mengatasi perbedaan kelas sosial?
14. Bagaimana peran kelompok dan kekuasaan dalam jaringan?
15. Bagaimana problematika diselesaikan?
16. Bagaimana kepentingan diakumulasi?
17. Bagaimana cara merekrut dan memobilisasi anggota/kelompok?
18. Bagaimana ketepatan waktu dibangun?

Lampiran 9. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telepon: 021-7490041 (Hunting)
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 37696 /UN31.1.13/LT/2014

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Schubungan dengan adanya penelitian oleh Staf Akademik FISIP Universitas Terbuka Tahun 2014 yang berjudul "KAJIAN *ACTOR NETWORKING THEORY* PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN DEMAK", maka kami mohon kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak untuk memberikan ijin penelitian di wilayah Kabupaten Demak. Responden yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang terlibat dalam Tim Sukses Pemenangan Pemilihan Bupati Demak, Birokrasi Pemerintahan, dan Anggota DPRD.

Adapun Tim yang akan melakukan penelitian adalah:

1. Dra. Susanti, M.Si.
2. Dra. Mani Festati Broto, M.Ed.
3. Setyo Kuncoro, S.S., M.A.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D
NIP. 196407221989031019



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Kyai Jebat No. 29, Telp. (0291) 685322 Psw. 124 Fax. (0291) 695684 Kode Pos 59511
<http://www.demakkab.go.id>, e-mai : kesbangpolinmas@demakkab.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET/SURVEY

NOMOR : 071/247 /XI/2014

- MEMBACA** : Surat Universitas Terbuka Tangerang Selatan Nomor : 38218 / UN31.1.13 / LT / 2014 tanggal 24 Nopember 2014 Rekomendasi Penelitian.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Ybs.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- NAMA** : Dra. SUSANTI. M.Si (dkk).
ALAMAT : Komp. UT Blok J/2 Rt. 04 Rw. 01 Desa. Jabonmekar Kec. Parang Kab. Dogor
- PEKERJAAN** : Dosen
KEBANGSAAN : Indonesia
JUDUL KEGIATAN/ PENELITIAN/SURVEI/PKL : KAJIAN ACTOR NETWORKING THEORY PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN DEMAK
SIDANG : Politik
LOKASI : Kabupaten Demak
LAMA : 27 Nopember 2014 s/d 27 Februari 2015
- PENELITIAN/KEGIATAN STATUS PENELITIAN** : Baru
PENGIKUT PESERTA : 1 (satu) orang
1. Dra. MANI FESTATI BROTO,.
M.Ed.
- PENANGGUNGJAWAB** : Prof. DARYONO,S,H.MA.Ph.D
SPONSOR : -
MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk merekonstruksi kembali jaringan aktor yang di bangun Bupati dalam proses pemilihan Kepala Daerah .

AKAN MELAKUKAN PENELITIAN DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati c.q. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak.

2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
5. Hasil kajian segera diserahkan 2 (dua) eksemplar kepada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak dan Bappeda Kabupaten Demak.
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan : D e m a k
Pada tanggal : 26 Nopember 2014

a.n. BUPATI DEMAK
An.KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS
Kepala Seksi Linmas

ANWAR MASDARI, S.IP,MM
Pejabat
NIP. 19720427 199203 1 005

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Demak;
2. Kepala Kan. Kesbangpolinmas Kab. Demak;
3. Kepala Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab.Demak;
4. Sekretaris DPRD Kab. Demak;
5. Ketua PD. Muhammadiyah Kab. Demak;
6. Ketua PC NU Kab. Demak;
7. Ketua LSM/ORMAS Se Kab. Demak;
8. Kepala KPA Kab. Demak;
9. A r s i p.